BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika Dibawah Umur Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam beberapa tahun terakhir ini yang paling banyak menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak atau remaja yang masih berusia di bawah umur, melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan adalah pihak orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak tergiur oleh obat-obatan terlarang dan minuman keras.

Kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis, mendidik, merawat, dan tidak boleh lalai kalau anaknya tidak ingin menjadi seorang penjahat. Apabila kebutuhan yang ada di rumah tidak tersedia bisa mendorong anak untuk mencari kebutuhan tersebut diluar, hal ini menjadi pemicu awal anak untuk melakukan kejahatan.

Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk melaporkan anaknya yang pecandu narkotika kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Orang tua atau pihak wali haruslah mengetahui anaknya masih belum cukup umur atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebagai pecandu narkotika.

Apabila orang tua tidak mengenal dan mengetahui anaknya sendiri tentu saja sangat mengherankan. Sikap orang tua yang membiarkan saja anaknya yang dibawah umur menjadi pecandu narkotika telah menunjukkan sikap batin orang tua yang mana tercerminlah niat, maksudnya adalah orang tua dengan sengaja tidak melaporkan padahal mengetahui anaknya yang belum cukup umur sebagai pecandu narkotika.

Sengaja tidak melaporkan berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban, baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.¹ Dalam pasal 128 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan *delik dolus* karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pelaporan.

Sesuai dengan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Anak hanyalah sebagai korban bukan pelaku dalam penyalahgunaan narkotika yang seharusnya bisa di cegah oleh orang tua. Orang tua sebenarnya mempunyai kewajiban terhadap anak di bawah umur yang telah kecanduan narkotika untuk melakukan wajib lapor kepada Pusat kesehatan

¹ AR. Sujono dan Boney Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 306.

masyarakat, Rumah sakit, dan atau Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial yang sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Ancaman sanksi bagi orang tua atau wali yang secara sengaja tidak melaporkan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini berarti Hakim mempunyai pilihan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu yang bersifat alternatif berupa pilihan antara kurungan atau denda. Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan dalam memutus suatu perkara.

Sanksi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pidana kurungan dan pidana denda dijabarkan di Buku kesatu Aturan umum dalam KUHP bab II tentang Pidana. Pidana Kurungan terdapat dalam pasal 18 – 29 KUHP sedangkan Pidana denda terdapat dalam pasal 30 – 31 KUHP.

Dalam hal ini, kesalahan Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang secara sengaja tidak melaporkan menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana. Berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya pidana atau pembedaan menjadi dasar dipidana atau tidaknya pelaku kejahatan. Tujuan pidana atau pembedaan terhadap pelaku dapat menentukan pengenaan, bentuk, dan lamanya yang dapat dijatuhkan. Pembedaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pembedaan.

Sanksi yang ada dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pemidanaan orang tua atau wali dari pecandu narkotika dikenai pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, karena pada dasarnya Pemerintah dan pihak Legislatif membuat Undang-undang tersebut sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah merajalela dari berbagai kalangan termasuk anak dibawah umur.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Tujuan dari adanya Peraturan Pemerintah tersebut untuk mengikutsertakan Orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu wajib laport juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Jadi cukup jelas jika orang tua atau wali pecandu narkotika terbukti secara sengaja tidak melaporkan adanya kejahatan dapat dikenai sanksi Pidana alternatif berupa pidana kurungan 6 bulan atau pidana denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal tersebut dianggap sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan.²

² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 13.

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam.

Narkotika dalam pandangan hukum Islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-qur'an maupun dalam As-sunnah. Dalam Islam dijelaskan mengenai sesuatu yang memabukkan disebut dengan istilah *khamr*. Terkait tentang sanksi bagi peminum *khamr* Ijma' para sahabat telah sepakat bahwa peminum *khamr* dapat dikenai *had* jilid, mereka telah sepakat tentang penetapan *had* bagi peminum *khamr* yaitu tidak boleh kurang dari 40 kali jilid.³

Dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus pecandu Narkotika dibawah umur tidak dapat dikenai sanksi *had* dikarenakan terdapat sebab-sebab hapusnya hukuman, sebab hapusnya hukuman ada 4 (empat) yaitu :⁴

1. Paksaan,
2. mabuk,
3. gila,
4. anak dibawah umur.

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilarang diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya karena keadaan pelaku yang tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia bisa dibebaskan dari hukuman.

Menurut syariat Islam, pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Sehubungan dengan dua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai

³ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Subang : PT. Al-Ma'arif, 1988), 283.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, 85.

dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut. Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.

Anak-anak merupakan amanah yang besar dan tanggung jawab yang berat. Bagi siapa saja yang dimuliakan oleh Allah dengan dikaruniakan anak kepadanya, maka ia wajib memberikan hak-haknya, baik pengasuhan maupun perhatian, pendidikan maupun pengajaran adab yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Alqur'an Surat At-Tahriim ayat 6.⁵

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

Dengan ayat ini Allah Swt. mengingatkan orang-orang yang beriman, bahwa semata mata beriman saja belumlah cukup. Iman harus dipelihara, dirawat dan dipupuk dengan cara menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api neraka. Memelihara diri dan keluarga termasuk anak dari neraka adalah dengan pendidikan dan pengajaran, kemudian memperhatikan perkembangan mereka agar berakhlak mulia dan menunjukkan kepada mereka hal hal yang bermanfaat dan membahagiakan.

Sebagai orang tua harus waspada, jika berdiam diri, tidak melarang, dan tidak mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, maka bukan saja

⁵ At-Tahriim (66) : 6

anak-anak yang telah melanggar syari'at Islam tersebut akan mendapatkan siksaan kelak di akhirat, namun juga orang tua mendapatkan siksaanNya.

Masalah gugurnya hukuman bagi anak yang dibawah umur sudah dijelaskan di atas yang kemudian hukuman tersebut dilimpahkan kepada orang tua atau walinya. Karena orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya dengan baik menjadi orang baik-baik. Apabila seorang anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak mengajarkan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah atau walinya yang menanggung akibat yang telah dilakukan anak dibawah umur akibat pecandu narkoba, yaitu orang tua diberi sanksi atas kelalaiannya.

Dalam hal hukuman yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud* atau *qishas* bagi orang pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Terkait dengan tindak pidana orang tua terhadap anaknya yang masih dibawah umur sebagai pecandu narkoba, tidak ada ketentuan sanksinya dalam hukum pidana Islam. Hukuman bagi orang tua atau wali tersebut, karena mereka tidak melakukan secara langsung maka dihukum jarimah *ta'zir*.

Ta'zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', maka penetapan sanksi *ta'zir* diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Baik hukumannya itu berupa kurungan penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat *mudharat* yang telah dilakukannya. Tindak pidana bagi orang tua yang mengetahui anaknya yang belum cukup umur menggunakan *khamr* dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pengasingan, untuk jarimah-jarimah selain zina,

hukuman tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjangar atau merugikan orang lain.